

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Jepang dalam menghadapi dinamika yang ada di Asia Timur selalu mengandalkan aliansinya dengan Amerika Serikat (AS). Hal tersebut didasari dengan hubungan aliansi keamanan Jepang dengan AS yang sudah ada sejak era Perang Dingin. Namun dengan adanya dinamika regional di Asia Timur seperti perkembangan ekonomi dan militer Tiongkok yang melaju pesat, pengembangan senjata nuklir dan misil Korea Utara, komitmen AS di Asia Timur, dan kompetisi kekuatan ekonomi besar antara AS dan Tiongkok membuat Jepang untuk merumuskan kebijakan luar negeri baru untuk mempertimbangkan membangun kerjasama disamping aliansi keamanan dengan AS. Ditengah dinamika Asia Timur yang sudah dijelaskan, Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang, mempertimbangkan untuk membangun hubungan kerjasama dengan Tiongkok dalam menghadapi keamanan Asia Timur dalam menghadapi pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan ketidakpastiaan komitmen AS di Asia Timur.

Keinginan Abe untuk membangun hubungan kerjasama dengan Tiongkok terindikasi sejak Pidato Abe pada 26 Juni 2013 yang berjudul *“Towards a More Advantageous Win-Win Relationship through My “Three Arrows”*. Mengutip langsung pidato Abe tersebut:

“And, I am looking forward to the day when I can have amicable discussions with the leaders of China, an important neighbouring country for Japan, in exactly this spirit of being at ease with each other” (MOFA Japan 2013C).

Dalam penggalan pidato Abe tersebut terlihat bahwa ajakan Abe kepada Tiongkok berdiskusi tak lain dikarenakan Tiongkok dinilai strategis bagi Jepang. Hal tersebut dinilai melalui perkembangan ekonomi dan militer Tiongkok, serta kedekatan kedua negara berdasarkan geografis.

Niatan Jepang untuk melakukan strategi *rapprochement* tercermin pada 17 Desember 2013, dalam peresmian dokumen Pedoman National Security Strategy (NSS). Peresmian NSS tersebut menetapkan dasar dari segala kebijakan luar negeri Jepang mengenai diplomasi dan pertahanan sehubungan dengan keamanan nasional, dan menyajikan isi kebijakan *proactive contribution to peace* (*sekkyokuteki heiwashugi*) dan *international cooperationism* (*kokusai kyochoshugi*) kepada masyarakat Jepang dan masyarakat internasional (Akimoto 2017: 10). Tujuan pedoman NSS dibuat untuk merespon isu-isu global terutama dalam regional Asia Timur yakni denuklirasasi¹ Korea Utara dan pengembangan ekonomi dan militer Tiongkok. Dalam skala regional Jepang menghadapi ancaman militer yang semakin meningkat dan masalah keamanan dari kemampuan rudal dan nuklir Korea Utara (Hughes 2009: 3). Bagi Jepang pula perkembangan pesat ekonomi dan tidak transparansinya pengembangan militer Tiongkok menjadi perhatian dari keamanan Jepang (MOFA Japan 2017). Dibawah pedoman NSS, implementasi yang akan dilakukan untuk menghadapi kedua dinamika tersebut ialah, pertama, Jepang akan menjaga dan mengembangkan aliansi keamanannya dengan AS. Kedua, Jepang menyebutkan akan memperkuat hubungan dengan Tiongkok dengan dasar “*Mutually Beneficial Relationship Based on Common Strategic Interests*” (MOFA Japan 2013B).

Pada tahun 2014, niatan Jepang untuk meningkatkan hubungannya semakin nyata. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penerimaan mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kunjungan yang dilaporkan sebagai "misi tersembunyi" bertujuan untuk membujuk Xi Jinping untuk bisa bertemu dengan Shinzo Abe dan membicarakan peningkatan Hubungan Jepang dengan Tiongkok (Xie 2014). Terdapat dua pertimbangan pemilihan Yasuo Fukuda untuk melakukan misi tersembunyi tersebut: pertama, kedekatannya dengan Tiongkok saat masa menjabatnya sebagai Perdana Menteri Jepang (South China Morning Post 2013). Kedua, sulitnya Perdana Menteri Jepang untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok dikarenakan aktifitas Shinzo Abe yang kerap

¹ Denuklirasasi merupakan penghapusan penggunaan senjata nuklir (KBBI t.t)

mengunjungi Kuil Yasukuni² (Huffpost, 2014). Setelah kunjungan itu, kementerian luar negeri Tiongkok menyatakan: “Abe sendiri menutup pintu dialog dengan para pemimpin Tiongkok. Orang-orang Tiongkok tidak menyambutnya.” (Huffpost 2014).

Kedatangan Yasuo Fukuda ke Tiongkok tersebut memperoleh respon yang menarik dari Tiongkok di forum ASEAN+3 pada 9 Agustus 2014 (Sekiyama 2014). Dalam sela-sela pertemuan ASEAN+3, Fumio Kishida bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Bagi Yi, pertemuan dengan Kishida dianggap sebagai langkah besar dalam mengembalikan hubungan Tiongkok dengan Jepang kembali normal (AFP 2014). Sementara bagi Fumio menekankan pentingnya pertemuan antara kedua belah pihak Menteri Luar Negeri (AFP 2014). Dalam pertemuan kedua Menteri Luar negeri tersebut, Fumio mencoba untuk meyakinkan pihak Tiongkok untuk mengadakan pertemuan antara Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Setelah pertemuan kedua belah Menteri Luar Negeri di ASEAN+3, dalam pertemuan tingkat tinggi Asian Pacific Economic Corporation (APEC) pada 7 November 2014, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu secara khusus selama 30 menit (Bodeen 2014). Dalam pertemuan yang tertutup, kedua pemimpin merumuskan empat poin konsesus yang ditujukan untuk menstabilisasikan hubungan kedua negara. Poin-poin tersebut yakni (MOFA Japan 2014), pertama, masing-masing pihak menegaskan bahwa mereka akan berfokus pada prinsip dan semangat dari empat dokumen dasar antara Jepang dan Tiongkok. Selanjutnya mereka akan terus mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepentingan strategis bersama. Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap "empat dokumen dasar" yang dikeluarkan antara Tiongkok dan Jepang, yang telah menjadi dasar bagi hubungan Tiongkok-Jepang sejak normalisasi hubungan diplomatik pada tahun

² Kuil Yasukuni merupakan tempat Perdana Menteri dan Staffnya berkunjung untuk menghormati para tentara Jepang yang meninggal saat Perang Dunia I. Bagi pemerintah Tiongkok, kuil Yasukuni dan aktifitas kunjungan yang dilakukan pemerintahan Jepang melambangkan penolakan Jepang untuk menebus kesalahan saat agresi Jepang ke Tiongkok saat Perang Dunia II (Goh 2013).

1972 (MOFA Japan 2014). Keempat dokumen tersebut adalah Pernyataan Bersama Tiongkok-Jepang tahun 1972, Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Tiongkok-Jepang 1978, Deklarasi Bersama Jepang-Tiongkok 1998 dan pernyataan bersama tentang memajukan hubungan pada 2008 (Tatsumi 2014); Kedua, masing-masing pihak sepakat untuk maju ke masa depan (MOFA Japan 2014). Langkah konkrit yang akan dilakukan mereka mengatasi kesulitan politik yang mempengaruhi hubungan bilateral mereka. Dalam poin kedua terlihat bahwa terdapat keinginan Tiongkok dalam dipemenuhinya permintaan untuk Jepang mengadopsi ‘sikap yang tepat’ terhadap sejarah dan ‘menghapus masa lalu militeris Jepang’.

Ketiga, kedua belah pihak mengakui bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai munculnya situasi tegang dalam beberapa tahun terakhir di perairan Laut Tiongkok Timur, termasuk yang di sekitar Kepulauan Senkaku (MOFA Japan 2014). Untuk meredakan sengketa teritorial ini kedua pihak sepakat untuk saling berbagi pandangan melalui dialog dan konsultasi, membentuk mekanisme manajemen krisis dan mencegah munculnya keadaan yang tidak terduga. Keempat, Kedua belah pihak berbagi pandangan bahwa, dengan memanfaatkan berbagai saluran multilateral dan bilateral, mereka akan secara bertahap melanjutkan dialog di bidang politik, diplomatik dan keamanan dan melakukan upaya untuk membangun hubungan politik yang saling percaya (MOFA Japan 2014).

Dalam menghadapi dinamika yang ada di Asia Timur, Jepang sangatlah mengandalkan aliansi keamanannya dengan AS. Hal tersebut tercermin pada buku diplomatik Jepang yang menyebutkan bahwa:

The Japan-U.S. Alliance is the linchpin of Japan's diplomacy and security, and plays an important role in maintaining the stability and prosperity for the Asia-Pacific region” (MOFA 2018).

Dari kutipan tersebut kita dapat melihat bahwa aliansi Jepang-AS merupakan dasar dari hubungan bilateral kedua negara. Hubungan bilateral kedua negara tersebut pula bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan dari regional asia-pasifik. Sehingga wajar apabila kebijakan luar negeri AS akan berdampak kepada

Jepang (MOFA Japan 2016). Karena berdampak tersebut, Shinzo Abe khawatir pada hubungan Jepang dan AS dalam masa pemerintahan Donald Trump. Abe khawatir akan slogan yang sering diucapkan oleh kandidat Trump yakni “*America First*” (Rosenberger 2017). Bahkan dalam kampanyenya tersebut, Trump berulang kali mengkritik Jepang karena praktik perdagangannya yang tidak adil dan kebebasan dalam persekutuan dengan AS. Bahkan Trump menyarankan Jepang harus memperoleh senjata nuklir dan mempertahankan diri (Smith 2017: 12). Bahkan Trump dalam kampanyenya berniat untuk menarik seluruh pasukan AS yang berada di Okinawa Jepang (Rosenberger 2017). Kebijakan yang diimplementasikan oleh Trump pun membuat Abe menjadi khawatir akan langkah yang dilakukan AS untuk mengamankan Asia Timur. Hal tersebut terlihat dalam pengalaman pidato Abe yang menyebutkan bahwa:

“I’m worried that medium-range missiles and short-range missiles, the kind of missiles that are threats to Japan, may not be taken up during the talks, where the focus may be limited to ICBMs,” (Yamaguchi 2018).

Bagi Abe, langkah yang dilakukan oleh Trump mencerminkan AS hanya berfokus pada dirinya sendiri dan tidak memperdulikan Jepang sebagai aliansi keamanannya (Yamaguchi 2018). Melihat langkah Jepang mulai mempertanyakan akan arah kebijakan luar negeri dan kepemimpinan AS di wilayah Asia Timur.

Kekhawatiran Jepang kepada kebijakan luar negeri dan kepemimpinan AS menjadi celah baru dari Jepang untuk membangun kerjasama baru. Kebangkitan Tiongkok sangat mempengaruhi perekonomian Jepang namun disatu sisi pula perkembangan militer Tiongkok membawa kekhawatiran pada Jepang (MOFA Japan 2017). Untuk mengamankan posisi Jepang sebagai mitra dagang terpercaya Tiongkok dan aman dari perkembangan militer yang mengancam, Jepang memutuskan untuk mendekati Tiongkok. Keinginan Jepang untuk bisa semakin dekat dengan Tiongkok terlihat pada 5 Juni 2017. Dalam pidatonya yang berjudul ‘*Asia’s Dream: Linking the Pacific and Eurasia*’, Abe mengatakan bahwa Jepang akan siap untuk bekerjasama dalam proyek *One Belt One Road* (OBOR) Tiongkok (MOFA Japan 2017B). Dibulan selanjutnya, tepatnya pada 8 Juli 2017, dalam sela pertemuan G-20 di Hangzhou, Jepang Tiongkok melakukan pertemuan tertutup. Dalam pertemuan

tersebut, kedua negara sepakat untuk menjadikan isu pengembangan nuklir Korea Utara sebagai ancaman bersama (MOFA Japan 2017). Ditahun yang sama, pada 26 Oktober 2018 Abe melakukan kunjungan ke Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat agar akan terus berkoordinasi erat menuju denuklirisasi Semenanjung Korea, yang merupakan tujuan bersama Jepang dan Tiongkok (MOFA Japan 2018A). Dalam pertemuan kali ini, Abe mengatakan bahwa Jepang-Tiongkok beralih dari kompetisi ke kolaborasi. Terakhir Abe pula mengatakan bahwa dirinya ingin mengangkat hubungan Jepang-Tiongkok ke era baru (Hurst 2018).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan muncul hal menarik akan hubungan Jepang-AS dan Jepang-Tiongkok. Jepang dihadapkan dengan dilema dalam menghadapi isu yang sedang berlangsung di Asia Timur. Di satu sisi, meskipun Jepang menganggap aliansi AS-Jepang sebagai vital bagi pertahanan dan stabilitas regional, Jepang mengkhawatirkan masa depan komitmen keamanan Amerikat Serikat untuk Asia Timur. Di sisi lain, Tiongkok mengalami perkembangan ekonomi dan militer yang pesat, membuat Jepang mempertimbangkan kerjasama dengan Tiongkok untuk menghadapi isu yang terjadi di Asia Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kebijakan denuklirisasi dengan Tiongkok pada tahun 2018 sementara Jepang telah mempunyai aliansi keamanan dengan AS?

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk mengungkap alasan dari strategi *rapprochement* yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kepada Tiongkok. Topik penelitian penulis dapat dianggap menarik karena Jepang sebagai aliansi kemanan AS, justru membangun kerjasama keamanan dalam menghadapi isu pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai *rapprochement* dari sebuah negara sudah dilakukan oleh beberapa penstudi seperti Evelyn Goh (2005; 2006); Marlin-Bennett (2012); Roselman (1990 dalam Ibrahim 2016); Al-Toraifi (2012 dalam Ibrahim 2016); Denmark dan Fontaine (2009); Erixon et al. (2012 dalam Ibrahim 2016). Tujuan penulis untuk memberikan tinjauan pustaka tak lain untuk memberikan gambaran bahwa sebelumnya sudah ada, namun penelitian yang saat ini penulis pun terdapat celah baru.

Evelyn Goh (2005: 2) Mendefinisikan *Rapprochement* sebagai sebuah strategi dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara yang bertujuan untuk mencegah munculnya hegemon dalam sistem internasional. Tak hanya Goh, Magen & Movdalsky, (2011: 20) pula sepakat dengan pemikiran Goh bahwa *Rapprochement* merupakan bagian dari strategi kebijakan luar negeri sebuah negara untuk mengurangi pengaruh hegemon dari suatu regional. Berbeda dengan penstudi sebelumnya, definisi yang diberikan oleh Jean A. Garrison (2005) menjelaskan *rapprochement* merupakan kebijakan yang mengkhianati sekutu lama. Garrison menjelaskan bahwa dalam *rapprochement* terdapat unsur pragmatis dimana negara memilih untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari sekutunya yang lama.

Dalam menganalisis *rapprochement*, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Apabila kita merujuk kepada kasus *rapprochement* Tiongkok-Rusia, kita akan menemukan perdebatan intelektual yang cukup besar tentang sejauh mana kerja sama tersebut dapat memengaruhi AS. Namun Marlin menjelaskan bahwa hubungan awal Tiongkok-Uni Soviet dapat dikonseptualisasikan sebagai agitasi untuk tatanan dunia alternatif dengan cara menyebarkan ide-ide komunis (Marlin, 2012). Hal tersebut dilakukan oleh Tiongkok dan Moskow untuk memperjuangkan sistem alternatif yang bertujuan mengimbangi atau menggantikan sistem dunia yang sentris-barat (Kuchins 2009: 116). Namun, hubungan Sino-Uni Soviet yang terpecah menciptakan kekosongan, di mana pemulihan hubungan Sino-AS pun mulai muncul. Oleh karena itu, pemulihan hubungan Tiongkok-Amerika pada tahun 1971 muncul setelah lebih dari

dua dekade permusuhan. *Rapprochement* muncul pada momentum ketika hubungan Tiongkok-Uni Soviet secara serius terancam oleh perselisihan ideologis dan kepribadian (Roselman, 1990 dalam Ibrahim 2016: 154). Lebih lanjut Roselman (1990: 51 dalam Ibrahim 2016: 154) menjelaskan bahwa kepribadian dari pemimpin dapat mengubah perbedaan geo-politik dari masing-masing negara. Bagi Jian (2003: 24), selain memudarnya hubungan baik Tiongkok dan Uni Soviet, adanya paksaan domestik dan memudarnya “status” revolusi berkelanjutan Mao dan ketidakmampuan Tiongkok untuk secara bersamaan memilih dua perkelahian dan mempertahankan permusuhan di dua sisi. Kedua hal tersebut yang mendorong Mao menuju *Rapprochement* kepada Amerika (Jian 2003: 26).

Selain *rapprochement* Sino-US, Iran dan Saudi tahun 1997-2009 merupakan pemain yang bersejarah dalam studi kasus *rapprochement*. Pergolakan hubungan mereka meluas hingga ranah isu-isu agama. Terlepas dari pergolakan yang terjadi, *rapprochement* Iran-Saudi berhasil dilakukan karena masing-masing pemimpin dapat menjembatani nilai-nilai fundamental yang dianut oleh masing-masing negara dan persoalitas dari kedua pemimpin (Al-Toraifi 2012 dalam Ibrahim 2016: 154). Apabila kita melihat kasus *Rapprochment* antara Tiongkok dan Taiwan, *rapprochement* terjadi dikarenakan kedua pemimpin negara memiliki identitas dan kepribadian yang sama. Tepatnya di tahun 2008, Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou memberi pengaruh baru bagi hubungan Tiongkok-Taiwan (Denmark dan Fontaine 2009: 8). Perubahan dramatis ini menggambarkan arah baru kebijakan luar negeri Presiden Ma, yang kebijakan dasarnya sangat kuat dan luar biasa membuat kebijakan luar negeri macet selama puluhan tahun, membawa lima perubahan substansial dalam hubungan Tiongkok-Taiwan (Yun-han 2009: 6 dalam Ibrahim 2016: 154). Kemudian *rapprochement* dianggap sebagai dasar untuk peluang yang lebih besar bagi ekonomi Taiwan dalam konteks investasi Eropa, karena dengan Taiwan memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, investor Eropa lebih berminat untuk menaruh uangnya di Taipei (Erixon et al., 2012 dalam Ibrahim 2016: 154).

Bagi Ibrahim (2016: 155), *rapprochment* dapat dipicu oleh perubahan struktural dalam sistem dan tatanan dunia, dan itu berlaku untuk pemulihan hubungan Indo-

AS. Akhir dari Perang Dingin menghadirkan putusan yang terpaksa oleh perubahan sistemik untuk melihat Washington sebagai teman, melepaskan diri dari retorika non-keberpihakan, dan yang terpenting, mengambil keuntungan dari apa pun yang dapat ditawarkan oleh negara adikuasa satu-satunya. Disaat *Bush Doctrine* menganjurkan demokrasi sebagai penangkal dari Terorisme, Indonesia sebagai negara muslim terbanyak didunia dan pula negara yang berbentuk demokrasi, menjadi pusat perhatian AS di Asia Tenggara. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendekati Indonesia bisa kita lihat sejak era Reformasi tahun 1998. Membantu Indonesia mengkonsolidasikan demokrasi dan memulihkan ekonominya yang runtuh adalah tujuan utama kebijakan AS selama pemerintahan Habibie (Marie 2010: 365). Mempromosikan pemulihan ekonomi merupakan tantangan langsung karena Indonesia menderita akan krisis ekonomi. Semenjak Indonesia mengalami teror bom pada 11 September 2001, semangat akan melawan teroris pun membuat AS semakin tertarik dengan Indonesia. Amerika pun pada akhirnya mendonorkan 50 Juta US Dollar untuk Indonesia sebagai bantuan untuk merubah sistem militer Indonesia. Namun langkah untuk mendekati Indonesia terhalangi oleh kepentingan AS yang menginvasi Iraq. Bagi Indonesia, langkah yang dilakukan oleh AS merupakan hal yang menantang Islam. Pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2004, dan Tsunami Samudra Hindia tiga bulan kemudian, menciptakan kondisi yang tepat untuk melakukan *rapprochment* kembali dengan Indonesia.

Beberapa contoh diatas mengenai kasus *rapprochement* antara negara-negara yang berkonflik memiliki perbedaan dan persamaan di dalam latar belakang *rapprochement* mereka. Contoh diatas pula memberikan penulis akan pola mengenai latar belakang mengapa *rapprochement* terjadi. Benang merah yang dapat kita peroleh dari contoh diatas ialah *rapprochement* merupakan sebuah kebijakan luar negeri dari sebuah negara. *Rapprochement* pula didasari oleh berbagai faktor; apabila kita melihat pada kasus *rapprochement* Amerikat Serikat-Indonesia kebijakan *rapprochement* dibentuk dikarenakan adanya perubahan sistem internasional. Jika merujuk pada kasus Sino-Amerikat Serikat, kebijakan *rapprochement* diambil untuk memunculkan kooperasi yang menguntungkan

masing-masing pihak. Selain itu didalam kasus Saudi-Iran, kebijakan *rapprochement* muncul karna adanya kesamaan identitas dan personitas dari masing-masing pemimpin negara.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan akan meliputi konsep-konsep yang berkaitan dengan rumusan permasalahan. Dalam penelitian ini pula penulis akan berfokus pada kebijakan Jepang terhadap Tiongkok maupun AS. Dalam penelitian kali ini pula penulis akan menggunakan konsep *rapprochement* untuk menjelaskan mengapa Abe berusaha untuk mendekati Tiongkok. Selanjutnya penulis akan menggunakan konsep *rapprochement* untuk menjelaskan posisi Jepang dalam kebijakan luar negerinya diantara Tiongkok dan AS.

1.5.1. Rapprochement

Rapprochement menurut Goh (2005: 4) muncul disebabkan oleh perkembangan strategis dan para pemimpin yang terampil dalam *realpolitik*. Lebih lanjut Evelyn Goh (2005: 2) mendefinisikan *Rapprochement* sebagai sebuah strategi dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara yang bertujuan untuk mencegah munculnya hegemon dalam sistem internasional. Lebih lanjut Goh menjelaskan bahwa *Rapprochement* menjadi sebuah pendekatan baru dalam studi hubungan internasional dalam mengkaji dua negara yang terpisah akibat adanya konflik. Tak hanya Goh, Magen & Moldavlsky, (2011: 20) pula sepakat dengan pemikiran Goh bahwa *Rapprochement* merupakan bagian dari strategi kebijakan luar negeri sebuah negara untuk mengurangi pengaruh hegemon dari suatu regional. Berbeda dengan penstudi sebelumnya, definisi yang diberikan oleh Jean A. Garrison (2005) menjelaskan *rapprochement* merupakan strategi yang mengkhianati sekutu lama. Garrison menjelaskan bahwa dalam *rapprochement* terdapat unsur pragmatis dimana negara memilih untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari sekutunya yang lama.

Dalam mengamati *rapprochement*, terdapat dua motif dari pemangku kebijakan merumuskan strategi *rapprochement*, yakni: 1). Motif domestik: menurut Takahara

(2017: 140), faktor ekonomi dan keamanan menjadi variabel yang menentukan mengapa pemangku kebijakan merumuskan strategi *rapprochement*. Dalam faktor ekonomi, *rapprochement* terjadi dikarenakan adanya ketergantungan akan perdagangan yang memiliki volume yang besar. Sementara dalam faktor keamanan, *rapprochement* dinilai berguna karna hal tersebut untuk mengamankan kondisi domestik dari eskalasi konflik yang ada dalam internal negara. Namun menurut Goh (2005: 129), faktor politik menjadi pula bagian dari motif *rapprochement* dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan acapkali strategi ini dibangun untuk memperkuat kepemimpinan dari suatu rezim dan untuk memperkuat posisi politik dalam parlemen.

Kedua faktor sistem internasional, Selanjutnya Goh (2005: 7) menjelaskan bahwa fokus konseptual dalam penelitian *rapprochement* adalah pada wacana yang terkonstruksi dalam kebijakan luar negeri. Hal tersebut dikarenakan yang dalam memproses wacana sebagai hal yang efektif bagi kebijakan luar negeri, beragam proses dibentuk oleh aktor kebijakan dan dimana pilihan kebijakan dibangun, diperebutkan, dan diimplementasikan. Untuk mempermudah penjelasan Goh, Ibrahim (2006) menjelaskan empat faktor yang berkontribusi sebagai pembangun strategi *rapprochement*: 1). Manfaat kerjasama; 2). Identitas negara dan personalitas dari seorang pemimpin; 3). Identitas politik; 4) Perubahan struktural dalam tatanan dunia internasional.

Dalam implementasinya, strategi *rapprochement* suatu negara dihadapi kendala dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi *rapprochement*: 1). Penyatuan perbedaan dari kedua negara (Goh 2005: 104): Dalam studi kasus yang diangkat *rapprochement* Sino-AS ditahun 1972, pemerintah Nixon kesulitan untuk menemukan titik temu untuk menyatukan perbedaan ideologi negara, jenis kerjasama yang akan dibuat, dan pencarian isu bersama; 2). *Timing of Political Steps*: Sebenarnya, ada satu alasan langsung mengapa pemulihan hubungan sino-Amerika Serikat tidak terjadi sebelum tahun 1972. Goh sendiri mengamati bahwa tidak ada mitra untuk *rapprochement* sampai adanya peristiwa konflik perbatasan antara Tiongkok-Soviet tahun 1969. Adanya konflik antara dua komunis tersebut

pada akhirnya memberikan celah untuk AS untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok (Goh 2005: 168).

1.6. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis memiliki hipotesis yang diajukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai alasan Shinzo Abe mendekati Tiongkok dalam rangka untuk menghadapi dinamika kawasan Asia Timur. Kebutuhan strategi *rapprochement* merupakan sebagai respon Jepang atas ketidakpastian akan posisi AS sebagai aliansi keamanan Jepang dalam melindungi Jepang dari ancaman perkembangan ekonomi dan militer Tiongkok serta pengembangan senjata nuklir dan misil Korea Utara. Keputusan Jepang dalam mendekati Tiongkok merupakan langkah untuk mengurangi resiko terburuk yang akan terjadi di kawasan Asia Timur.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1. Rapprochement

Dalam mengoperasionalkan *rapprochement* dalam penelitian ini, terdapat dua pandangan yang akan disajikan. Pertama, sudut pandang yang berupaya untuk mendeskripsikan faktor-faktor domestik yang dianggap melandasi proses *rapprochement* tersebut. Sedangkan sudut pandang kedua lebih banyak berbicara mengenai faktor sistemik di tingkat regional yang kemudian dipandang sebagai determinan utama pendorong munculnya kebijakan denuklirisasi Korea Utara bersama Tiongkok.

Dalam penelitian ini, indikator *rapprochement* menggunakan empat faktor yang berkontribusi sebagai pembangun strategi *rapprochement*: 1). Manfaat kerjasama; 2). Identitas negara dan personalitas dari seorang pemimpin; 3). Identitas politik; 4) Perubahan struktural dalam tatanan dunia internasional.

Pemaparan dalam tingkat regional, dinamika kawasan akan dikaitkan sebagai motif dari strategi *rapprochement* Jepang-Tiongkok. Dalam hal ini, pertimbangan

kebangkitan Tiongkok dalam ekonomi maupun militer, pengembangan senjata nuklir Korea Utara, dan komitmen AS di Asia Timur menjadi alasan utama dari Jepang membangun strategi *rapprochement*. Selanjutnya, pemaparan mengenai faktor-faktor domestik kemudian terbagi lagi menjadi dua klasifikasi utama yakni deskripsi mengenai faktor domestik yang mampu melandasi proses *rapprochement* serta deskripsi terkait saran serta alternatif kebijakan yang dapat diambil guna mendukung upaya harmonisasi hubungan bilateral Jepang serta Tiongkok.

1.7.1.2. Dinamika Kawasan

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab satu latar belakang, kebijakan NSS yang diadopsi oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe merupakan dasar dari kebijakan luar negeri Jepang yang mengupayakan *proactive contribution to peace* (*sekkyokuteki heiwashugi*) dan *international cooperationism* (*kokusai kyochoshugi*) (Akimoto 2018: 10). Apabila konsep dinamika kawasan ini dioperasionalkan, terdapat variabel yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang. Dalam pandangan penulis, variabel yang mempengaruhi yaitu: kepentingan nasional, hubungan antar-negara dalam kawasan Asia Timur, dan faktor ketergantungan terhadap kawasan. Melalui kepentingan nasional yang dijadikan alasan untuk membuka hubungan dengan negara lain, hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan satu sama lain dalam suatu kawasan apabila hubungan tersebut menguntungkan kedua pihak sehingga kepentingan nasionalnya tercapai. Namun apabila hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak lagi menguntungkan maka akan berimplikasi pada penurunan ketergantungan dan posisinya dalam kawasan tersebut.

1.7.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, yakni hubungan antara Jepang-Tiongkok dan Jepang-AS. Tujuannya ialah untuk menguji hipotesis melalui kerangka pemikiran.

1.7.3. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian ini memiliki rentang tahun 2013-2018. Hal tersebut dikarenakan Shinzo Abe menjadi Perdana Menteri Jepang periode kedua. Dalam periode kedua tersebut Abe menunjukkan keinginannya dan mendekat kepada Tiongkok. Selain itu pula dalam rentang tahun 2013-2018, dinamika akan pengembangan senjata nuklir, komitmen AS di Asia Timur, dan perkembangan ekonomi dan militer Tiongkok.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder dari berbagai referensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari buku teks, jurnal ilmiah tercetak dan daring, berita, artikel dan laporan dari organisasi internasional

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, teknik ini digunakan dalam menganalisis data-data berupa informasi dengan bentuk kumpulan kata atau angka yang memiliki sifat kualitatif dalam bentuk kalimat yang dipilah dari berbagai sumber berdasarkan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian kali ini penulis akan membagi penjelasan kepada lima bab. Pada bab pertama, penulis menjelaskan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan metodologi penelitian. Dalam Bab Kedua menyampaikan hubungan Jepang-Tiongkok dan Jepang-AS. Selanjutnya Bab Ketiga berisi faktor *rapprochement* yang dilakukan Shinzo Abe kepada Tiongkok. Bab Keempat diisi oleh kesimpulan penelitian.